

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses dari pengimplementasian demokrasi yang dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin daerah mereka, dimana akan ada kebebasan, keadilan dan kesejahteraan pada setiap masyarakat dalam bidang apapun (Zulkarnaen et al., 2020). Pelaksanaan Pilkada yang demokratis terus diupayakan oleh negara agar dapat menciptakan pemimpin daerah yang berkompeten dan dapat merepresentasikan kepentingan rakyat (Utami, 2021). Menurut Prayudi (Utami, 2021) untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang berkualitas maka diterapkan sistem Pilkada serentak.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 diikuti sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah dari 544 (lima ratus empat puluh empat) jumlah total provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah tersebut dibagi atas 9 (sembilan) provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) kota termasuk Kabupaten Blora. Pelaksanaan Pilkada serentak kali ini dilaksanakan di tengah kondisi pandemi covid-19 yang hampir melanda seluruh negara di dunia.

Kabupaten Blora dalam Pilkada 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 63/PL.02.03/Kpt/3316/kpu-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2020, pasangan nomor satu Dra. Hj. Umi Kulsum dan Agus Sugianto, S.E. dengan partai pengusung NasDem, PPP, dan Gerinda. Pasangan nomor urut dua, H. Arief Rohman, M.Si. dan Tri Yuli

Setyowati, S.T, M.M. yang di usung oleh partai PDI P, PKB, PKS, dan Perindo. Pasangan nomor urut tiga, Dra. Dwi Astutiningsih dan Riza Yudha Prasetya, S.Hut. yang di usung oleh parai Golkar, Demokrat, dan Hanura.

Gambar 1.1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020



Sumber: Instagram KPU Kabupten Blora, @kpukabblora

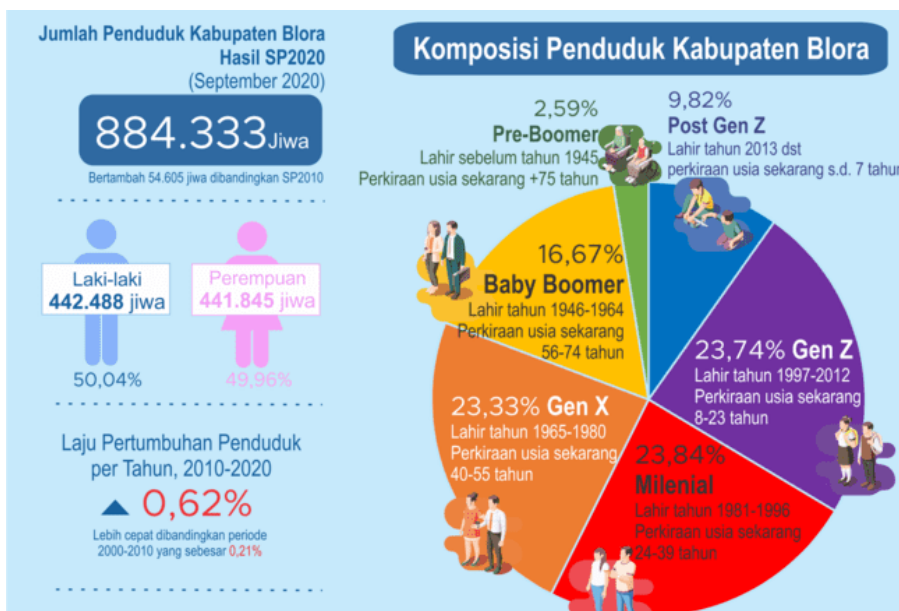
Badan kesehatan dunia, *World Healty Organizations* (WHO) sudah menyatakan bahwa pandemi covid-19 adalah pandemi global. Menyikapi kondisi tersebut terbitlah PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2020). Keputusan ini di terbitkan untuk menyiapkan secara khusus tentang tahapan Pilkada serentak tahun 2020 karena pandemi covid-19. Melanjutkan keputusan PKPU tersebut, pelaksanaan Pilkada yang semula akan dilaksanakan pada bulan September ditunda dan telah dilaksanakan pada bulan Desember yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Utami, 2021).

Dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak, guna dapat menciptakan pemimpin daerah yang berkompeten dan dapat merepresentasikan kepentingan rakyat harus ada partisipasi dari masyarakat. Pilkada di Indonesia diikuti dari semua kalangan masyarakat pemilih salah satunya adalah pemilih Generasi Z. Generasi Z adalah satu generasi di atas generasi milenial yang hangat dan banyak diperbincangkan dari berbagai kalangan.

Menurut hasil dari Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, komposisi penduduk Indonesia yang berasal dari generasi Z atau Gen Z sebanyak 27,94 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Generasi Z yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012 (puslitjakdikbud.kemendikbud, 2021). Usia generasi Z sekarang di tahun 2021 diantara 8 sampai 24 tahun. Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah generasi Y atau generasi milenial (Amru et al., 2021). Pemilih pemula pada Pilkada 2020 lahir pada tahun 2000 sampai 2003 atau usia 17 sampai 21 tahun, sehingga masuk kedalam generasi Z.

Lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) mengkategorikan kelompok milenial usia 22 sampai 36 tahun, dan untuk pemilih pemula dikategorikan usia 17-21 tahun (Mohammad, 2019). Dalam usia tersebut generasi Z mendominasi jumlah dari pemilih pemula. Pada tahun 2018, menurut artikel *Time* yang berjudul *How Generation Z Will Change The World* menggambarkan akan ada perubahan besar yang terjadi di tangan generasi Z (Abdulloh, 2021). Pada umumnya generasi Z memiliki ciri khas kuat yaitu *digital natiev*, sehingga partisipasi politik cenderung didapatkan dari media online.

Gambar 1.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Blora



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora

Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora menunjukkan bahwa terdapat 23,74% generasi Z yang diperkirakan sekarang berusia 8-23 Tahun. Berdasarkan hasil tersebut Menurut peraturan KPU usia 17 sudah memiliki hak untuk memilih. Komposisi tersebut secara tidak langsung akan ada setengah dari generasi Z yang bisa menggunakan suaranya di dalam Pilkada Kabupaten Blora tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Blora ada 884.333 jiwa, jika jumlah generasi Z 23,74 % dari jumlah penduduk, artinya generasi Z ada 209.941 jiwa. Dari 209.941 jiwa setengah dari itu secara umur akan memiliki hak suara untuk memilih di Pilkada 2020 sebesar 104.970 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Generasi Z di 3 Kabupaten Eks Karisidenan Pati

No	Kabupaten	Jumlah Generasi Z (Usia 10-24/2020)
1.	Blora	209.941 jiwa
2.	Rembang	153.654 jiwa
3.	Grobogan	357.570 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah-Sensus Penduduk 2020

Eks Karisidenan Pati yang terdiri dari 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, Blora, Rembang, Grobogan, Kudus, dan Jepara yang mengikuti Pilkada 2020 hanya ada 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Rembang. Generasi Z di Kabupaten Blora lebih banyak di bandingkan dengan kabupaten Rembang, sedangkan paling banyak adalah Kabupaten Grobogan. Namun dalam Pilkada 2020 Kabupaten Grobogan hanya ada calon tunggal yang tidak ada persaingan antar calon. Kabupaten Blora terdiri dari 3 calon yang akan merebutkan suara dari generasi Z. Hal ini sangat menarik karena rata rata generasi Z adalah pemilih pemula yang baru menggunakan hak pilihnya. Masing-masing calon harus mampu menarik minat generasi Z untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020.

Sadar tidak sadar dalam perkembangan teknologi di massa sekarang, menurut Akmal dan Salman (2015) khususnya media baru dan media sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (Yolanda & Halim, 2020). Generasi Z yang cenderung menguasai teknologi dan internet sejak kecil di tambah lagi dengan kondisi saat ini yang serba digital akan sangat mudah ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Sehingga siapapun akan menjadi bebas untuk

menyampaikan pendapatnya dengan kecepatan dan lingkup bahasan yang sulit untuk dibayangkan (Qudsi & Syamtar, 2020).

Pengetahuan Politik akan sangat mudah didapatkan melihat kondisi yang saat ini sedang berkembang. Dengan adanya teknologi semua bisa dipermudah untuk mencari sebuah informasi, terutama terkait tentang politik. Pengetahuan politik salah satunya adalah dasar dari perilaku seseorang (Nugraha, 2020). Sehingga harus ada penyaringan informasi yang dilakukan oleh masyarakat supaya informasi yang didapatkan tidak membuat perilaku seseorang tersebut tidak baik. Literasi politik adalah salah satu upaya untuk mencegah itu semua, agar pengetahuan politik masyarakat khususnya generasi Z yang masih usia-usia rentan terhadap informasi yang tidak pantas didapatkan. Literasi politik dengan literasi demokrasi jelas berbeda. Literasi politik akan lebih spesifik membahas terkait dengan Pemilu, sedangkan literasi demokrasi cakupannya lebih luas tidak hanya di bidang Pemilu saja, melainkan pemilu merupakan sebagian salah satu cara berdemokrasi. Literasi demokrasi sendiri bukanlah sebatas diskursus tanpa aksi, melainkan paduan antara pengetahuan, keterampilan sekaligus sikap dan tindakan sebagai warga negara (Kpu.blitarkota.go.id, 2021). Output dari literasi demokrasi berbeda dengan literasi politik karena literasi politik lebih dapat dipahami sebagai pengetahuan dan kompetensi warga negara untuk dapat berperan aktif dalam memberikan perhatian terkait proses politik dan isu-isu politik yang sedang berjalan (Jejara.bawaslu.go.id, 2021).

Literasi politik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik generasi Z. Menurut Bernard dalam Katarudin & Putri (2020) mendefinisikan literasi politik adalah mengimplementasikan senyawa pengetahuan,

keterampilan dan sikap mengenai politik serta hal kecil seperti isu-isu politik dan dapat mempengaruhi diri sendiri dan orang lain dalam pengambilan keputusan. Adanya literasi politik ini secara tidak langsung generasi Z mendapatkan pendidikan politik yang membantu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Literasi politik sangat penting untuk generasi Z dalam menghadapi Pilkada 2020. Menurut Mudhok (2005) yang di kutip dalam Karim (2015) ada empat elemen yang dapat diukur tingkat literasi politiknya, yaitu:

1. Kehirauan dan kesadaran seseorang bahwa pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, kewenangan, dan perannya.
2. Kemampuan seseorang dalam membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam upaya menghasilkan suatu *outcome* politik.
3. Pengetahuan tentang kebijakan, perencanaan, serta anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
4. Partisipasi dalam suatu kegiatan politik.

Dari empat elemen tersebut generasi Z jelas dapat menerapkannya dikehidupan sehari-hari, apalagi dalam kesehariannya generasi Z tidak terlepas dengan *handphone* atau *smartphone* dalam segala aktifitas di dunia maya yang menggunakan internet. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh *Weare Hootsuite* per Januari 2021, diketahui bahwa Ada 170,0 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2021. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 10 juta (+6,3%) antara tahun 2020 dan 2021. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021 (Kemp, 2021). Selain itu juga ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021. Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 27 juta (+16%)

antara tahun 2020 dan 2021. Penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% pada Januari 2021.

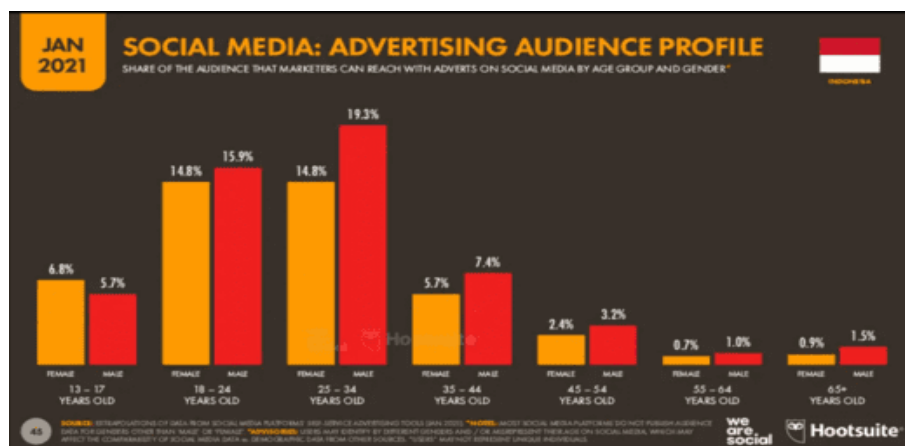
Tabel 1.2 Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jawa Tengah 2019-2020

Kabupaten / Kota	Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Jawa Tengah							
	4G/LTE		3G/H/H+/ EVDO		2,5G/E/GPRS		Tidak ada	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kabupaten Grobogan	216	245	61	33	3	1	-	-
Kabupaten Blora	246	263	49	32	-	-	-	-
Kabupaten Rembang	214	260	73	32	7	2	-	-
Kabupaten Pati	291	342	109	63	6	1	-	-
Kabupaten Kudus	118	120	12	10	1	1	1	1
Kabupaten Jepara	168	165	27	28	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Penggunaan media sosial jika tidak didukung dengan jaringan yang stabil tidak akan dapat berjalan dengan baik. Menurut data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah penerimaan sinyal internet di kabupaten dan kota eks Karisidenan Pati, Kabupaten Blora memiliki peringkat paling tinggi di susul oleh Kabupaten Jepara, dan paling terendah adalah Kabupaten Kudus karena masih ada satu desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada jaringan internetnya.

Gambar 1.3 Pengguna Media Sosial Berdasarkan Umur



Sumber: Datareportal-Digital 2021: Indonesia

Dari hasil data diatas dapat dipahami bahwa generasi Z mendominasi penggunaan media sosial dalam keseharian. Mereka akan rela menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial. Sehingga hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial akan menjadi media literasi politik dalam momentum pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Berangkat dari permasalahan diatas, generasi Z adalah generasi yang melekat dengan teknologi sejak kecil, sehingga harus dapat dikaji peran partisipasi politiknya dan aktifitasnya selama rangkaian pelaksanaan Pilkada 2020. Dengan demikian peneliti ingin mengangkat tentang pengaruh media sosial terhadap pengetahuan politik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Blora, sehingga peneliti akan mengetahui sejauh mana pengaruh media sosial sebagai sumber pengetahuan politik terhadap literasi politik generasi Z dalam Pilkada 2020 di era pandemi covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Dari hasil analisis latar belakang di atas, melihat peran generasi Z yang tidak dapat terlepas dari teknologi dan internet khususnya media sosial dalam pengetahuan politiknya sehingga penulis mencoba merumuskan masalah: Bagaimana pengaruh media sosial sebagai sumber pengetahuan politik terhadap literasi politik generasi Z pada Pilkada 2020 Kabupaten Blora?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yang peneliti rumuskan adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial sebagai sumber

pengetahuan politik terhadap literasi politik generasi Z dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Blora.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi referensi pengembangan ilmu di bidang politik yang berfokus pada pengetahuan politik generasi Z di dalam pesta demokrasi guna mengetahui apakah media sosial meningkatkan literasi politik khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Selain itu juga penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian baru yang memiliki topik yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis untuk mengetahui perilaku generasi Z dalam mencari dan mengumpulkan informasi politik dalam rangka membuat keputusan politik dalam pemilu. Dengan mengetahui perilaku generasi Z dalam mencari dan mengumpulkan informasi maka dapat ditentukan model kampanye yang paling cocok dengan generasi Z.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan politik guna meningkatkan literasi politik di era pandemi covid-19 dapat dipetakan atau dikategorikan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Juwandi, Nurwahid & Lestari (2019) yang berjudul Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik untuk Mengembangkan

Literasi Digital Warga Negara yang membahas terkait keresahan dimana eksistensi media sosial (Twitter dan Instagram) sebagai jejaring sosial saat ini berperan penting untuk sarana pendidikan politik di era digital ini karena setiap postingan akan ada narasi kampanye dan ajakan untuk ikut serta berpartisipasi dalam Pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah media sosial memiliki peranan penting sebagai wadah pendidikan politik di era digital bagi masyarakat, walaupun masih dalam tahap mencari data mengenai kandidat para calon yang mereka akan pilih dalam pilkada 2019. Oleh karena itu media sosial dirasa mampu menarik minat generasi muda untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridha & Riwanda (2020) yang berjudul Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital, berawal dari keinginan peneliti untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media dan literasi politik terhadap partisipasinya. Hasilnya literasi media dan literasi politik mempengaruhi partisipasi kewarganegaraan pemilih pemula baik secara parsial maupun simultan. Selain itu tingkat literasi media pemilih pemula tidak menjadi pemicu lemah atau kuatnya hubungan literasi politik dengan partisipasi kewarganegaraan yang dimiliki pemilih pemula.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Iswandi & Efendi (2020) yang berjudul Pendidikan Literasi Politik bagi Generasi Muda di Kota Jambi berawal dari keresahan penulis akan minimnya pengetahuan dan penguasaan terhadap literasi politik. Tujuannya adalah untuk membangun pengetahuan literasi politik yang berkelanjutan untuk generasi muda melalui pengiat-pengiat literasi. Selain itu juga mensosialisasikan literasi politik kepada generasi muda kedepannya menjadi

pewaris kemajuan demokrasi di Indonesia. Hasilnya dari penulisan ini adalah bertambahnya pengetahuan generasi muda Kota Jambi terhadap literasi politik dan bisa meningkatkan budaya diskusi serta minat membaca bagi generasi muda terhadap literasi politik di Kota Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani (2017) yang berjudul Pengaruh Berita Politik Dalam Koran Serambi Indonesia Terhadap Pengetahuan Politik Pemuda Kemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Tengah, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberitaan politik terhadap pengetahuan politik pemuda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya berita politik dalam koran Serambi Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan politik pemuda. Sehingga pengaruh media tersebut sangat besar dalam bentuk kognisi masyarakat Aceh termasuk juga dalam Pilkada 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Candra, & Sulaeman (2019) yang berjudul Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Berpolitik Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur dilatar belakangi oleh peran media sosial di era globalisasi ini memberikan peran sangat penting dalam memberikan informasi kepada siswa, yang notabene mereka adalah pemilih pemula. Melalui media sosial informasi tentang politik akan sangat mudah didapatkan dan tersebar luas. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaruh media massa terhadap kesadaran politik siswa sangat besar. Teknologi jelas memberikan pengaruh dan peran yang penting seperti media sosial, media cetak maupun media elektronik memberikan pemahaman kepada siswa sehingga dalam memanfaatkan media massa harus lebih bijaksana dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam setiap kegiatan-kegiatan politik. Oleh

karena itu, pengaruh media massa secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran berpolitik siswa dan bersikap demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Himawati & Arwani (2022) yang berjudul *Penyuluhan Mengenai Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kota Bengkulu* berawal dari keresahan penulis akan pentingnya pendidikan politik guna menumbuhkan kesadaran politik bagi pemilih pemula untuk memberikan pengetahuan secara substantif dan komprehensif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pengetahuan siswa mengenai pendidikan politik mengalami kenaikan setekah mendapatkan materi dari tim pengabdian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan politik akan naik jika dilakukan pendidikan politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosadi, Darmawan, dan Anggraeni (2020) yang berjudul *Pengaruh Pesan Politik di Media Sosial Terhadap Peningkatan Literasi Politik Generasi Milenial yang dilatarbelakangi oleh generasi milenial yang menilai politik sebagai hal yang buruk dan di rasa membosankan*. Akibatnya menurunkan rasa kepercayaan generasi milenial terhadap politik yang menyebabkan literasi politiknya rendah. Penyampaian pesan yang menarik dan kreatif tentang politik di media sosial akan dapat memberikan informasi yang baik dan akan meningkatkan minat dan literasi politik pada generasi milenial. Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pesan politik melalui media sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap literasi politik generasi milenial.

Penelitian yang dilakukan oleh Qudsi dan Syamtar (2020) dengan judul *Instagram dan Komunikasi Politik Generasi Z dalam Pemilihan Presiden 2019*

meneliti tentang dengan adanya media sosial Instagram sudah memberikan dinamika dalam demokrasi di Indonesia. Namun pengguna media sosial sebagai sumber informasi dan tempat komunikasi politik sepertinya memunculkan rasa dilematis di tengah-tengah masyarakat. Dengan hadirnya Gen Z sebagai kelompok paling rentan harusnya dapat menjadi perhatian khusus karena kehadirannya juga perlu di perhitungkan karena memiliki basis suara yang banyak juga. Oleh karena itu dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana generasi Z menggunakan Instagram sebagai sumber informasi dan juga media komunikasi politik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan informan mahasiswa Program Studi Komunikasi sebanyak 10 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa ada empat (4) karakteristik generasi Z dalam menggunakan Instagram sebagai sumber informasi dan media komunikasi politik. Empat karakteristik tersebut adalah *Unengaged User*, *Exclude User*, *Pasif User*, dan *Active User*. Keempat karakteristik tergantung pada kombinasi antara orientasi politik dan tingkat keinginan seseorang untuk mencapai tujuan yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni'amah (2018) yang berjudul *Pemilih Pemula, Sosial Media dan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tulungagung tahun 2018* meneliti terkait sejauh mana generasi muda atau pemilih muda dengan adanya sosial media dapat mempengaruhi pilihannya dan partisipasinya di Pilkada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif kualitatif diperkuat data kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemilih muda cenderung suka konten informasi yang umum dan lebih suka kontek isu politik nasional dan provinsi dibandingkan lokal atau daerah. Namun hal ini sudah menunjukkan bahwa sudah muncul kesadaran bagi pemilih bukan hanya sekedar ikut yang populer di

masyarakat tetapi kesadaran untuk memilih kepala daerah akan ikut menentukan nasibnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Saud, Ida, Abbas, et all (2020) yang berjudul Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda: Prespektif Indonesia memberikan tanggapan bahwa dengan adanya digitalisasi pada massa modern sudah memberikan peluang kepada generasi muda untuk ikut berpartisipasi di bidang informasi dan sosial. Media sosial bagi kalangan muda memiliki kecenderungan dan telah berkontribusi terhadap para pemilih untuk mengubah pandangan generasi muda terhadap haknya untuk memilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik purpose roudom sampling untuk memberikan peluang yang sama terhadap responden. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya media sosial dan jejaring sosial, banyak menyediakan platfrom yang berbeda dengan yang lainnya untuk mendiskusikan tentang politik.

Dari 10 penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan, yang menjadi pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah indentifikasi kasusnya generasi Z dalam Pilkada 2020 di era pandemi covid-19. Terlepas itu, peneliti ingin mengangkat penggunaan media sosial generasi Z guna mengetahui tingkat pengetahuan politik terhadap literasi politik generasi Z di Pilkada 2020. Dalam penelitian ini mengambil studi kasus Pilkada Kabupaten Blora yang jumlah generasi Z cukup banyak dan didukung dengan sebaran sinyal internet yang sudah merata di bandingkan daerah Jawa Tengah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik adalah konsep utama dalam pendidikan pendapat publik dan perilaku politik. Pengetahuan politik merupakan dasar dari perilaku politik pemilih. Menurut Sigmud Freud dalam Nugraha (2020), pengetahuan politik diibaratkan dengan dua bidang, dua bidang tersebut bidang politik dan psikologi sosial. Artinya kedua bidang itu berkembang dengan sendirinya untuk menerapkan model psikologis terhadap masalah-masalah politik dan sosial. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa manusia didefinisikan sebagai *zoon politicon*, yaitu manusia merupakan binatang yang berpolitik. Aristoteles menggarisbawahi tentang posisi manusia terkait penyelenggaraan kekuasaan demi mencapai kemaslahatan publik. Argumentasi Aristoteles juga diperkuat oleh Georgio Agamben yang menyebutkan manusia dengan dua istilah, pertama: *zoe* (fakta biologis tentang kehidupan), kedua *bios* (kehidupan berpolitik atau kehidupan yang dipersyaratkan untuk berkualitas) (Nugraha, 2020).

Secara tidak langsung dapat diketahui bahwa pengetahuan politik adalah dasar perilaku politik seseorang yang dapat dijelaskan dalam konsep behavior. Jason Brabas dkk dalam Nugraheni (2017), menjelaskan tentang pengetahuan politik dalam jurnal "*The Question(s) of Political Knowledge*" dimana "*political knowledge is a central concept in the study of publik opinion and political behavior*". Pengetahuan politik adalah konsep sentral dalam studi opini publik dan perilaku politik seseorang, yang dapat dilihat dari prespektif behavior dan pendekatan psikologis. Menurut Outhwaite yang dikutip dalam Karimi (2012: 33) oleh Nugraheni (2017) menjelaskan bahwa secara sederhana perilaku dapat

diartikan sebagai “setiap tindakan manusia yang dapat dilihat”. Hal tersebut dalam prespektif behaviorisme, penjelasan perilaku adalah apa yang dilakukan oleh seseorang, bukan hanya sekedar bagaimana seseorang itu bergerak. Paham behaviorisme menurut Nasiwan (2012: 33) dalam Nugraheni (2017) menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik seseorang sehingga akan berpengaruh pada perilaku politiknya.

Terjadinya pengetahuan politik sebagai alat ukur untuk mengetahui terjadinya pengetahuan, menurut John Hospers dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to Philosophical Analysis*” mengemukakan ada empat hal, yaitu pengalaman indra, nalar, otoritas, dan wahyu. Masing masing memiliki makna tersendiri yaitu:

1. Pengalaman Indra (*sense experience*)

Seseorang terkadang sering merasa penginderaan adalah alat vital untuk mendapatkan pengetahuan. Dikehidupan manusia penginderaan merupakan satu-satunya alat untuk menyerap semua objek yang ada di luar diri manusia.

2. Nalar

Nalar merupakan corak berfikir yang menggabungkan beberapa pikiran yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru.

3. Otoritas

Otoritas merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang dan di akui oleh kelompoknya. Hal tersebut datang karena ada pengetahuan yang terjadi dari wibawa seseorang.

4. Wahyu

Wahyu merupakan berita yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-Nya untuk kepentingan umat. Seseorang yang memiliki pengetahuan dari wahyu justru akan melakukan sesuatu dengan baik. Karena dapat dikatakan bahwa wahyu adalah sumber dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia melalui kepercayaan kita.

Pengetahuan dikenal hanya ada di dalam pikiran manusia, karena tanpa pikiran maka pengetahuan tidak akan menjadi perhatian. Menurut Bahm dalam Sufriadi (2021) ada 8 hal penting yang dapat berfungsi untuk membentuk struktur pikiran manusia, yaitu mengamati, menyelidiki, percaya, hasrat, maksud, mengatur, menyesuaikan, dan menikmati.

Menurut Notoatmojo dalam Sufriadi (2021) faktor faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah usia, pendidikan, sumber informasi, pengalaman dan pekerjaan. Usia akan mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pendidikan juga salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi dan semakin banyak informasi yang masuk maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Sumber informasi adalah data yang diproses kedalam suatu bentuk yang mempunyai nilai nyata dalam membuat keputusan. Informasi yang diperoleh dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan

cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Terakhir adalah pekerjaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dimana terjadi pertukaran informasi yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan.

Menurut Edkins et all (2010) dalam Nugraha (2020) pengetahuan politik dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu interaksi dan hubungan. Sehingga akan dapat dilihat tingkat kemampuan masyarakat dalam memptaktikkan pengetahuan politik yang dimilikinya. Sementara itu, Jack Dennis dalam Budianto (2017), merumuskan tiga variabel terkait pengetahuan politik, yaitu pengetahuan tentang pemerintah, pengetahuan tentang aturan main politik, dan pengetahuan tentang tujuan lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengetahuan politik adalah hasil pembelajaran tentang pemerintah, peraturan dalam melakukan politik, seperti undang-undang dan hasil pembelajaran tentang tujuan lingkungan serta masyarakat.

Sumber dari pengetahuan dan pemahaman akan politik dapat diperoleh dari pendidikan politik. Menurut Subakti (2010) dalam Sufriadi (2021) pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Dengan melalui proses tersebut, masyarakat akan mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik. Pendidikan politik sendiri tidak hanya terfokus kepada perubahan sikap politik individu saja, melainkan juga diarahkan kepada pembaharuan bentuk dari struktur politik dan lembaga kemasyarakatan. Menurut Winarno (2009) dalam Sufriadi (2021) orientasi pendidikan politik adalah mengubah masyarakat dengan

kesadaran yang bersifat baik menjadi masyarakat yang bersifat kritis. Pendidikan politik untuk saat ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.

1.6.2. Literasi Politik

Literasi politik, dalam sejarah perkembangannya di Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama sejak reformasi bergulir pada tahun 1998 silam, yang telah merubah tatanan demokrasi (Sutisna, 2017). Literasi politik saat ini sangat dibutuhkan oleh generasi Z. Pilkada yang berkualitas memerlukan syarat pemilih (*voters*) yang cerdas, kritis, rasional dan bertanggungjawab dengan pilihannya, sehingga pemilih dalam hal ini harus melek politik.

Bernard Crick (Katarudin & Putri, 2020) literasi politik adalah pengimplementasian senyawa pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik dari hal kecil seperti isu politik yang dapat mempengaruhi diri sendiri dan bahkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Sementara itu menurut Denver dan Hands (1990) sebagaimana dikutip oleh Carol A. Casel dan Celia C.Lo (Heryanto, 2019) memberikan pengertian literasi politik sebagai pengetahuan dan pemahaman terhadap proses-proses dan isu isu politik yang memungkinkan orang-orang memainkan peranan mereka sebagai warga negara.

Sementara itu menurut Mudhok (2005) yang di kutip oleh Karim (2015) ada empat elemen yang dapat diukur tingkat literasi politiknya, yaitu:

1. Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, kewenangan, dan perannya

2. Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik
3. Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik
4. Partisipasi dalam kegiatan politik.

1.6.3. Media Sosial

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi belakangan ini pada masyarakat Indonesia berkembang sangat pesat, dan hampir semua aspek kehidupan termasuk kehidupan sosial politik (Juwandi et al., 2019). Perkembangan teknologi yang sejalan dengan kondisi tersebut adalah maraknya media sosial yang banyak digunakan kalangan dari anak kecil sampai orang tua dalam segala aktivitasnya. Media sosial berbasis internet sekarang sering digunakan dan melekat pada generasi ini, seperti *Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Blog* (Komariah & Kartini, 2019).

Di dalam (Hidayat et al., 2019), menurut Danah M. Boyd dan Nicole B. Ellison mendefinisikan media sosial sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu tersebut untuk (Boyd, 2007:3):

1. Membangun profil publik dan atau semi publik dalam sistem yang tanpa batas,
2. Mengartikulasi daftar pengguna lain dengan siapa mereka berbagi sambungan,
3. Melintas serta melihat daftar koneksi mereka dan sesuatu yang dibuat oleh pengguna atau orang lain dalam satu sistem.

Hal lain yang diungkapkan oleh M. Boyd dan Nicole B. Ellison menjelaskan bahwa media sosial merupakan hal yang unik, dikarenakan media sosial ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengartikulasikan dan membuat orang lain melihat jaringan sosial mereka. Akibatnya hubungan antara individu satu dengan yang lainnya tidak secara langsung dibuat, namun membuat hubungan tersebut yang sembunyi sembunyi atau laten bagi para pengguna yang saling kenal secara di dunia nyata.

Pendapat lain yang di dalam (Munzir et al., 2019) menurut Nasrullah media sosial setidaknya ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni: *social networking* (jejaring sosial), *blog* (jurnal online), *micro-blogging* (jurnal online sederhana atau microblog), *media sharing* (media berbagi), *social bookmarking* (penanda sosial), dan media konten bersama atau Wiki.

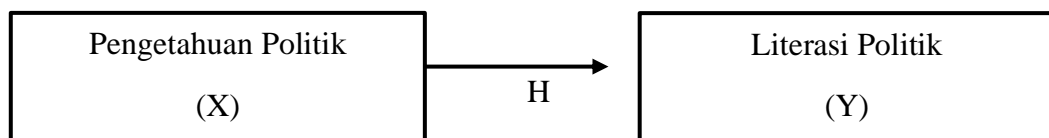
Perkembangan media sosial sekarang ini juga digunakan untuk konten marketing. Tidak hanya konten berupa artikel, namun video, podcast (konten audio), e-book, dan sebagainya juga disebar pada web blog atau situs resmi dan jejaring sosial. Jika media sosial diarahkan ke situs atau blog, kemudian situs tersebut mempersuasi pengunjung untuk menyebarkannya di berbagai jejaring sosial, maka hal itu dapat meningkatkan visibilitas atau keadaan yang dapat dilihat dan diamati dari konten tersebut (Sulianta, 2015).

Media sosial akan dapat menjadi sebuah sumber pengetahuan politik dikarenakan tidak hanya konten keseharian tetapi juga konten politik juga akan bermunculan di saat serangkaian Pilkada sudah berjalan. Keseringannya menggunakan internet dan media sosial memiliki peran utama dalam menyebarkan informasi termasuk pengetahuan bagi masyarakat (Komariah & Kartini, 2019).

Oleh karena itu media sosial sebagai alat dalam teknologi informasi berbasis internet tersebut secara praktis akan menjadi sangat efektif untuk dijadikan media untuk melakukan penyebaran informasi, pengembangan pengetahuan, wadah pertukaran informasi, pengembangan usaha maupun iklan layanan pemerintahan dan kampanye politik

1.7. Model Penelitian/Skema Penelitian

Model Penelitian/Skema Penelitian



Keterangan

X = Variabel independen/bebas

Y = Variabel dependen/terikat

H = Hipotesa/dugaan

1.8. Hipotesis

Pengetahuan politik mempengaruhi literasi politik generasi Z.

1.9. Definisi Konseptual

1.8.1. Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik adalah tingkat kemampuan masyarakat dalam studi opini dan perilaku politik yang dapat dilihat dari pengetahuan tentang pemerintah, peraturan terkait aturan main politik, dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar sebagai interaksi dan hubungan yang berpengaruh terhadap literasi politik.

1.8.2. Literasi Politik

Literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang kesadaran politik dari hal kecil seperti isu politik yang dapat mempengaruhi diri sendiri dan bahkan orang lain.

1.8.3. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang dapat digunakan untuk berinteraksi dan media berbagi (*share*) informasi yang ada di internet tanpa ada batas jangkauan.

1.10. Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator
Pengetahuan Politik, Dennis (Budianto, 2017)	Pengetahuan tentang pemerintah	Generasi Z mengetahui calon Bupati dan Wakil Bupati di serta visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati di Media Sosial
	Pengetahuan terkait aturan main politik	Generasi Z dapat memahami aturan yang sudah ditetapkan, mengenai proses pilkada 2020.
	Pengetahuan tentang lingkungan dan masyarakat	Generasi Z dianggap cakap dan sudah dapat mengambil bagian sebagai subyek dalam pelaksanaan Pilkada serta berpartisipasi aktif dan ikut mengawasi jalannya pemilu di lingkungannya.
Literasi Politik, Bernard Crick (Katarudin & Putri, 2020)	Pengimplementasian senyawa pengetahuan, keterampilan dan sikap	Generasi Z mampu mengimplementasikan senyawa pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik dari hal kecil seperti isu politik, mengikuti media sosial penyelenggara dan pasangan calon, sehingga dapat mempengaruhi diri sendiri dan bahkan orang lain.

1.11. Metode Penelitian

1.10.1. Jenis Penelitian

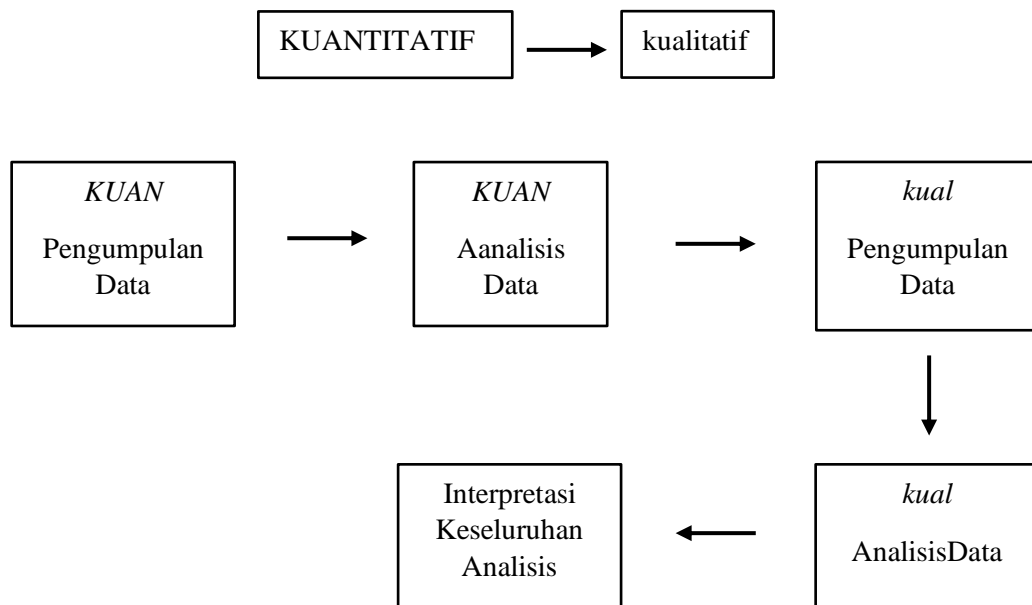
Dari permasalahan di atas peneliti dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Menurut Creswell (2014) penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Strategi eksplanatori sekuensial digunakan dalam penelitian ini. Strategi eksplanatoris sekuensial diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang selanjutnya diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif (Creswell, 2014). Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019:16-17) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami bagaimana fenomena itu terjadi (Bataha & Fauziah, 2020).

Bobot untuk penelitian ini lebih diprioritaskan kepada hasil survey, dan didukung dengan data sekunder untuk hasil analisis data. Penelitian tahap pertama ini menggunakan metode survey, menurut Sugiyono (2019:57) metode penelitian survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapatan, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu.

Tahap kedua peneliti memperluas dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder.

1.10.2. Desain Penelitian

Desain Penelitian dengan menggunakan
Strategi Eksplanatoris Sekuensial



Sumber: Creswell (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran

Desain penelitian diatas lebih menitikberatkan kepada penelitian kuantitatif yaitu hasil survey, dan selajutnya di didukung dengan data sekunder dari model penelitian kualitatifnya. Hasil analisis data yang menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial seperti desain di atas diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dengan menyebarkan angket atau kuisisioner kepada responden yang sudah di buat oleh peneliti. Kemudian diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif.

1.10.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Blora, karena Kabupaten Blora juga termasuk dari 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada 2020 untuk memilih Kepala Daerah. Generasi Z di Eks Karisidenan Pati, Kabupaten Blora lebih banyak di bandingkan dengan kabupaten Rembang, sedangkan paling banyak adalah Kabupaten Grobogan. Namun dalam Pilkada 2020 Kabupaten Grobogan hanya ada calon tunggal yang tidak ada persaingan antar calon. Kabupaten Blora terdiri dari 3 calon yang akan merebutkan suara dari generasi Z. Selain itu penerimaan sinyal internet di kabupaten dan kota Kabupaten Blora memiliki peringkat paling tinggi. Dari literatur yang ada peneliti juga belum menemukan penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini yang mengambil studi kasus di Kabupaten Blora. Hal ini sangat menarik karena rata rata generasi Z adalah pemilih pemula yang baru menggunakan hak pilihnya.

1.10.4. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D memberikan pengertian populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk generasi Z yang memiliki hak pilihnya saat Pilkada 2020 Kabupaten Blora, yaitu penduduk yang lahir pada tahun 1997-2003 dengan rentan usia 17-24. Usia generasi Z yang lahir pada tahun 1997-2012 Kabupaten Blora pada tahun 2020 adalah 23,74 % dari jumlah

penduduk, artinya generasi Z ada 209.941 jiwa. Dari 209.941 jiwa setengah dari itu secara umur akan memiliki hak suara untuk memilih di Pilkada 2020 sebesar 104.970 jiwa. Maka populasi menurut pandangan peneliti pada penelitian ini adalah 104.970 Jiwa. Populasi ini tidak spesifik sehingga dalam penentuan sampling peneliti akan menggunakan rumus dari Cochran.

B. Sampel

Menurut Anshori dan Iswanti (2012) sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Dalam penetapan atau pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel yang harus mewakili terhadap populasinya.

Dalam penelitian ini jumlah pasti populasi hanya asumsi peneliti yang memberikan opini bahwa setengah dari generasi Z yang mana belum spesifik untuk jumlah populasinya. Oleh karena itu dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik penghitungan sampling rumus dari Cochran.

$$\begin{aligned} \text{Rumus Cochran} \quad n &= \frac{z^2pq}{e^2} \\ &= \frac{(1,96)^2 (0,5) (0,5)}{(0,5)^2} = 385 \end{aligned}$$

n= jumlah sampel yang diperlukan

z= Harga dalam kurve normal untuk simpangan 5%, dengan nilai 1,96

P= Peluang benar 50%

q= Peluang salah 50%

e=Tingkat kesalahan sampel (sampling eror) 5%

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 385 orang untuk mengetahui pengaruh media sosial sebagai literasi politik genrasai Z di Kabupaten Blora terhadap keikutsertaannya dalam Pilkada 2020.

Dari jumlah sampel tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data *Simple Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2019) teknik ini dalam pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

Dalam teknik ini metode pengambilan sampel penelitian ini diseusiakan dengan tujuan penelitian, dimana sampel yang digunakan sesuai dengan kriteris-kriteria tertentu yang ditetapkan. Dimana kriteris tersebut sebagai berikut:

1. Berusia 17-23 tahun (generasi Z) pada saat Pilkada 2020 berlangsung
2. Memiliki alat komunikasi (Handphone, laptop, komputer)
3. Memiliki akun media sosial (Instagram, Fabecook, Twitter, Tiktok)

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

A. Data primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian ini untuk mengatahu tingkat literasi politik generas Z di Kabupaten Blora dalam partisipasi politiknya dalam Pilkada 2020, maka peneliti melakukan penyebaran kuisisioner. Kuisisioner (metode angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. Pertanyaan di sususn secara

sistematik, kemudian dikirim untuk di isi oleh responden. Kuisisioner akan disebar di 16 Kecamatan dengan 385 responden generasi Z yang berusia 17-24 tahun pada tahun pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Blora. Tidak ada batasan disetiap kecamatan, hanya saja setiap kecamatan harus dapat mendapatkan responden.

B. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang digunakan untuk mendukung data, informasi data primer. Data sekunder diataranya dokumen, buku, undang-undang, jurnal, media cetak online atau offline seperti koran digital dan koran print dan catatan yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.10.6. Instrumen dan Pengukuran Data Peneliti

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisisioner tertutup dimana pertanyaan yang membawa responden ke jawaban alternatif yang sudah di susun oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih pada pilihan yang sudah disediakan.

Skala pengukuran menurut Sugiyono (2019:145) merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan *skala likert* untuk pengukuran datanya. Menurut Sugiyono (2019:146) *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan di ukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak penyusunan item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala likert yang digunakan untuk menentukan pendapat responden dalam kuisioner, yaitu:

- A: Sangat Setuju (memiliki bobot 5)
- B: Setuju (memiliki bobot 4)
- C: Ragu Ragu (memiliki bobot 3)
- D: Tidak Setuju (memiliki bobot 2)
- E: Sangat Tidak Setuju (memiliki bobot 1)

1.10.7. Teknis Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:206) teknik analisis data merupakan proses mencari dan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Analisis data *mixed methods* dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, yaitu:

1. Analisis campuran bersama: analisis terhadap data kualitatif dan kuantitatif
2. Analais kualitatif-kuantitatif: analisis data kualitatif diikuti pengumpula dan analisis data kuantitatif sebagai penegasan
3. Analisis kuantitatif-kualitatif bertahap: analisis data kuantitatif diikuti dengan analisis data kualitatif.

Dari tiga cara analisis diatas penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif-kualitatif. Jadi analisis dilakukan pada data kuantitatif dengan menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS kemudian di ikuti dengan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dengan merujuk pada hasil survey dengan analisis

deskriptif. Setelah dimasukkan ke aplikasi Smart PLS dan di deskripsikan dari hasil statistik selanjutnya akan di dalam lagi dengan metode kualitatif.

Langkah pertama penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Bentuk statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif dapat dilakukan pencarian kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.

Selain itu peneliti juga memakai metode analisis data dengan memakai aplikasi Smart PLS yang dioperasikan dengan memakai media komputer. PLS (Partial Least Square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang mana secara simultan dapat melakukan pengujian contoh model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. SEM (Structural Equation Modeling) digunakan untuk menghitung fenomena yang terdapat dilapangan & menguji hipotesis/ kebenaran yang telah diperkirakan sebelumnya diaman sebuah evolusi dari model persamaan berganda (regresi) yang dikembangkan menurut prinsip ekonometri & digabungkan menggunakan prinsip pengaturan (analisis faktor) (Rakhman, 2020). Peran analisis faktor merupakan penggunaan untuk

melakukan analisis hubungan antara indikator dengan variabel latennya, sedangkan regresi berperan menganalisis interaksi variabel latennya.

Menurut Solimun dalam Eka & Yasa (2017) Uji Partial Least Square PLS merupakan contoh analisis yang kuat lantaran mempunyai beberapa kelebihan yaitu, bisa diterjemahkan pada seluruh data, berukuran sampel tidak terlalu besar, bisa mengkonfirmasi teori, dan bisa menciptakan interaksi suatu variable yang belum mempunyai landasan teori. Peneliti memakai model hubungan formatif dimana konstruk dapat diartikan menjadi konsep yang telah dibatasi pengetiannya (unsur, ciri, & sifatnya) sehingga dapat diamati & diukur. Model interaksi ditunjukkan menggunakan X menjadi variabel independen atau tetap sedangkan Y sebagai variabel dependen atau bebas. SEM-PLS dalam penelitian ini untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji regresi dan hipotesis.

Ghozali dalam Ilham et al (2021) berpendapat suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengajuan Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor pada setiap butir soal (E-government et al., 2021).

Dari hasil analisis akan didapat nilai korelasi (r hitung). Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen (pertanyaan) tersebut valid dan bisa diteruskan ke penelitian. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel, berarti pertanyaan tersebut tidak valid. Pertanyaan tersebut harus di ganti atau dihilangkan.

Menurut Ghozali Uji Reliabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan di kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji realibilitas digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.

Uji Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara variabel dengan variabel lainnya (Heryana, 2020). Sedangkan uji hipotesa adalah suatu proses evaluasi kekuatan sampel, dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait populasinya untuk nanti diketahui apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima.

Langkah kedua, setelah menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji regresi dan hipotesis menggunakan Smart PLS untuk melihat apakah generasi Z dengan adanya media sosial dapat mempengaruhi pengetahuan politiknya di analisis dengan menggunakan literatur review atau jurnal jurnal terkait yang dapat menguatkan hasil dari uji tersebut.